



Pajak dan Kesadaran Masyarakat menjadi Pilar Utama Pembangunan Nasional dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara

Okia Agati Br Ginting^{1*}, Grace Eklysya Br Sitepu², Lorita Tarigan^{3*}, Shinta Klara Br Tarigan⁴, Rohani Br Sihotang⁵

¹⁻⁵Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

E-mail: okia@student.undiksha.ac.id¹, grace.eklysya@student.undiksha.ac.id², lorita@student.undiksha.ac.id³, shinta.klara@student.undiksha.ac.id⁴, rohani@student.undiksha.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: okia@student.undiksha.ac.id

Abstract. Taxes are a primary source of state revenue and play a crucial role in supporting national development. However, increasing tax revenue still faces several challenges, particularly the lack of public awareness in fulfilling tax obligations. This study aims to examine the role of public awareness in improving taxpayer compliance and its impact on state revenue. The approach used in this research is qualitative, reviewing literature from various previous studies. Research findings indicate that tax awareness, understanding, and knowledge have a positive impact on taxpayer compliance. Other economic factors such as inflation, population, and economic growth also play a role in influencing tax revenue. However, external factors such as socialization and tax sanctions show inconsistent results. Consequently, increasing public awareness through tax education is a key strategy for sustainably improving the country's performance. In addition, transparent tax management and effective government communication are important factors in strengthening public trust and encouraging voluntary taxpayer compliance. Therefore, collaboration between the government and society is needed to create a sustainable and effective taxation system that supports national economic growth.

Keywords: Awareness; Compliance; State Revenue; Tax; Tax Education.

Abstrak. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Akan tetapi, peningkatan penerimaan pajak masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran kesadaran publik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap pendapatan negara. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mengkaji literatur dari berbagai riset sebelumnya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor ekonomi lain seperti inflasi, populasi, dan pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam memengaruhi penerimaan pajak. Akan tetapi, elemen luar seperti sosialisasi dan sanksi pajak memperlihatkan hasil yang tidak stabil. Sebagai akibatnya, peningkatan kesadaran publik melalui edukasi pajak menjadi strategi kunci dalam meningkatkan peningkatan negara secara berkelanjutan. Selain itu, transparansi pengelolaan pajak dan komunikasi pemerintah yang efektif juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata kunci: Edukasi Pajak; Kepatuhan; Kesadaran; Pajak; Pendapatan Negara.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu elemen penting dalam sistem penerimaan negara yang berperan sebagai sumber dana untuk pembangunan nasional. Dalam konteks negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pajak berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengumpulan dana (*budgeter*), tetapi juga sebagai alat pengaturan (*regulerend*) dalam mengarahkan kebijakan sosial dan ekonomi. Karena itu, pengoptimalan pendapatan pajak menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan fiskal pemerintah (Mardiasmo, 2024; Resmi, 2019).

Meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak sering kali belum mencapai potensi maksimal yang diinginkan. Salah satu penyebab utama yang mengakibatkan keadaan itu adalah minimnya tingkat patuh dari wajib pajak. Kepatuhan ini dipengaruhi tidak hanya oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis, terutama tingkat pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Pratama & Setiawan, 2022; Putra & Lestari, 2019). Kesadaran publik dalam konteks perpajakan adalah cerminan dari pemahaman, sikap, dan pandangan individu mengenai signifikansi pajak sebagai sumbangan untuk perkembangan negara. Studi menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh besar terhadap tingkat ketaatan (Ningsih & Umaimah, 2024). Di samping itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak (Susanti & Putri, 2020).

Sebaliknya, elemen ekonomi makro seperti inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan populasi juga berkontribusi dalam menentukan penerimaan pajak (Berutu & Kuntadi, 2023). Ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak adalah hasil dari interaksi rumit antara faktor perilaku dan situasi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan seksama fungsi pajak dan tingkat kesadaran masyarakat sebagai dasar utama dalam pembangunan nasional serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan negara (Kurniawan & Sari, 2023).

2. KAJIAN TEORI

Konsep Pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat kepada negara secara wajib menurut hukum, tanpa menerima imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2024), pajak memiliki dua peran utama, yakni peran *budgeter* sebagai sumber pendapatan negara dan peran *regulerend* sebagai instrumen untuk mengendalikan kebijakan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan negara, pajak berfungsi secara strategis sebagai sumber utama pendanaan berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Resmi, 2019).

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu elemen internal dan eksternal (Sari & Susanti, 2020). Faktor internal mencakup kesadaran, etika, dan pemahaman wajib pajak, sementara faktor

eksternal meliputi hukuman perpajakan, pelayanan dari fiskus, dan sistem pajak. (Gunarso et al., 2024) menyebutkan bahwa niat untuk membayar pajak dipengaruhi oleh pandangan terhadap sistem perpajakan, keadilan, serta keuntungan pajak itu sendiri. Kepatuhan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang bersifat paksaan (*enforced compliance*).

Kesadaran Masyarakat dalam Perpajakan

Kesadaran publik adalah keadaan di mana individu menyadari, mengakui, dan bersedia memenuhi kewajiban pajaknya tanpa tekanan. Kesadaran ini menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami, menganggap, dan merasakan arti penting pajak untuk kemajuan negara. Kesadaran wajib pajak berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan. Semakin meningkat kesadaran masyarakat, maka semakin meningkat pula kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kesadaran masyarakat dipengaruhi tidak hanya oleh pengetahuan, tetapi juga oleh nilai-nilai moral, sosial, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga, peningkatan pemahaman masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun sistem perpajakan yang efisien.

Pengetahuan dan Literasi Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan wajib pajak tentang regulasi, tata cara, serta keuntungan pajak. Pemahaman perpajakan yang baik akan mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Studi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami dengan baik umumnya lebih patuh karena mereka menyadari akibat dari ketidakpatuhan dan keuntungan dari membayar pajak. Meskipun begitu, pemahaman saja tidak cukup tanpa disertai dengan pandangan positif terhadap sistem perpajakan.

Pandangan dan Keyakinan terhadap Sistem Perpajakan

Pandangan wajib pajak terhadap sistem perpajakan berkaitan dengan opini mereka mengenai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Pandangan yang baik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan adalah elemen krusial dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Wajib pajak yang yakin bahwa pajak dikelola dengan transparan dan untuk kepentingan masyarakat akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, pandangan negatif terhadap pengelolaan pajak dapat mengurangi tingkat kepatuhan, meskipun wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai.

Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Selain aspek perilaku, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Berutu dan (Berutu & Kuntadi, 2023) menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti populasi, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kegiatan ekonomi, sehingga memperluas basis perpajakan. Di sisi lain, situasi ekonomi yang tidak stabil bisa mengurangi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.

Teori *Slippery Slope Framework*

Teori *Slippery Slope Framework* mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua elemen utama, yakni kekuatan otoritas (*power of authority*) dan kepercayaan masyarakat (*trust in authority*). Kekuatan otoritas berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk menerapkan hukum melalui pemantauan dan penalti, sementara kepercayaan berkaitan dengan pandangan publik terhadap integritas dan keterbukaan pemerintah. Keseimbangan antara kedua elemen tersebut akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang paling baik. Apabila hanya bergantung pada sanksi tanpa menciptakan kepercayaan, maka kepatuhan yang diperoleh cenderung bersifat sementara.

Hubungan Pajak, Kesadaran Masyarakat, dan Pembangunan Nasional

Pajak dan pemahaman masyarakat saling terkait dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak berperan sebagai sumber pendanaan, sedangkan kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepatuhan. Semakin meningkat kesadaran publik, maka semakin besar sumbangan pajak yang diterima oleh negara. Ini akan mempengaruhi peningkatan kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak dan kesadaran publik bisa dianggap sebagai dua pilar penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena perpajakan, terutama mengenai peran kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dampaknya terhadap penerimaan negara. Sementara itu, pendekatan deskriptif diterapkan untuk secara sistematis menjelaskan hubungan antarvariabel berdasarkan hasil dari berbagai sumber ilmiah.

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dilakukan melalui kajian, analisis, dan sintesis terhadap sejumlah sumber referensi yang berkaitan dengan topik studi. Studi literatur bertujuan untuk mengembangkan dasar teoritis yang menyeluruh serta mengenali dan membandingkan temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pajak, kesadaran publik, dan ketaatan wajib pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks tentang perpajakan, laporan riset, serta publikasi resmi dari pemerintah. Pemilihan sumber data dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan relevansi, keandalan, dan aktualitas informasi yang mendukung fokus penelitian, yaitu hubungan antara kesadaran masyarakat, kepatuhan pajak, dan penerimaan negara.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan berbagai jenis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini meliputi identifikasi kata kunci, pencarian sumber ilmiah, pemilihan literatur berdasarkan kriteria tertentu, serta pengelompokan data berdasarkan variabel yang diteliti. Analisis data pada studi ini menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara menginterpretasikan serta mensintesis informasi dari sejumlah sumber literatur. Langkah-langkah analisis terdiri dari pengurangan data, penyajian data secara teratur dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. Di samping itu, analisis dilaksanakan secara komparatif untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya demi mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Keabsahan data dipertahankan melalui metode triangulasi sumber, yakni dengan mencocokkan informasi yang dikumpulkan dari beragam referensi yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk memperkuat validitas dan keandalan hasil penelitian. Penelitian ini terbatas karena hanya memanfaatkan data sekunder dan tidak melibatkan pengumpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pajak Sebagai Pilar Pembangunan Nasional

Pajak berfungsi sebagai alat dasar yang mendukung kelangsungan pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang yang memiliki batasan dalam sumber pendanaan non-pajak. Dominasi pajak dalam struktur pendapatan negara menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang signifikan, sehingga efisiensi sistem perpajakan menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan.

Secara konseptual, pajak berperan tidak hanya sebagai sumber pendanaan (*budgeter*), tetapi juga sebagai sarana redistribusi dan stabilisasi ekonomi. Lewat sistem perpajakan, pemerintah dapat mendistribusikan sumber daya dengan lebih adil, meminimalisir kesenjangan, serta mengatur dinamika ekonomi makro. Dalam konteks ini, pajak berfungsi sebagai alat kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, optimalisasi fungsi pajak bergantung pada kualitas institusi perpajakan. Sistem yang tidak jelas, birokrasi yang rumit, serta rendahnya tanggung jawab dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik. Keyakinan ini adalah syarat penting dalam menciptakan legitimasi pajak. Tanpa adanya legitimasi yang kuat, pajak sering dianggap sebagai beban, bukannya sebagai sumbangan untuk pembangunan. Dengan demikian, efektivitas pajak sebagai pilar pembangunan ditentukan tidak hanya oleh aspek teknis, tetapi juga oleh dimensi sosial dan institusional yang membentuk interaksi antara negara dan warga.

Kesadaran sebagai Determinan Utama

Kepatuhan kesadaran publik adalah faktor utama dalam memahami perilaku kepatuhan pajak. Dalam konteks teori perilaku, kesadaran menunjukkan penghayatan nilai dan norma yang mendorong individu untuk bertindak sejalan dengan tanggung jawab sosialnya. Kesadaran ini tidak hanya bersifat logis, tetapi juga etis, di mana pembayaran pajak dianggap sebagai sumbangan terhadap kepentingan bersama.

Kepatuhan yang bersumber dari kesadaran (*voluntary compliance*) memiliki ciri yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan kepatuhan yang bersifat paksaan. Hal ini disebabkan karena dorongan untuk mematuhi datang dari dalam diri seseorang, bukan dari tekanan luar seperti hukuman atau pengawasan. Studi empiris mengindikasikan bahwa kesadaran berperan penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ningsih & Umaimah, 2024).

Secara kritis, ketergantungan pada metode represif seperti hukuman dapat menciptakan efek jera untuk sementara, tetapi tidak efektif dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut bahkan berpotensi menimbulkan perlawanan jika tidak diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran. Maka dari itu, strategi kebijakan pajak harus difokuskan pada pengembangan kesadaran bersama dengan pendekatan yang mendidik, melibatkan, dan berbasis nilai, sehingga kepatuhan bukan lagi suatu paksaan, melainkan menjadi bagian dari budaya masyarakat.

Peran Pengetahuan dan Persepsi

Pengetahuan perpajakan merupakan fondasi kognitif yang membentuk cara pandang individu terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang memiliki tingkat literasi perpajakan yang tinggi cenderung mampu memahami manfaat pajak, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Hal ini akan meningkatkan rasionalitas dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak.

Namun demikian, pengetahuan saja tidak cukup untuk menjamin kepatuhan. Persepsi terhadap sistem perpajakan memiliki peran yang sama pentingnya, terutama dalam membentuk kepercayaan (trust) terhadap pemerintah. Persepsi positif, seperti keyakinan bahwa pajak dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan publik, akan memperkuat motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Sari & Sisanti, 2012). Sebaliknya, persepsi negatif dapat menghambat kepatuhan, bahkan pada individu yang memiliki pengetahuan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara peningkatan literasi perpajakan dan perbaikan citra serta kredibilitas sistem perpajakan. Tanpa adanya kepercayaan, pengetahuan yang tinggi tidak akan secara otomatis menghasilkan kepatuhan.

Pengaruh Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah penentu eksternal yang memengaruhi kemampuan nyata wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pendapatan berhubungan langsung dengan kemampuan membayar pajak. Perkembangan ekonomi yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kegiatan bisnis, sehingga memperluas basis pajak serta menaikkan pendapatan negara. Sebaliknya, situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi yang tinggi atau resesi, dapat mengurangi daya beli dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pajak sering dianggap sebagai beban ekstra, sehingga tingkat kepatuhan biasanya menurun. Ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi tidak hanya oleh kesadaran, tetapi juga oleh daya beli. Studi membuktikan bahwa aspek ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap penghasilan pajak (Berutu & Kuntadi, 2023). Karena itu, kebijakan pajak harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi ekonomi, seperti melalui pemberian fasilitas pajak atau pelonggaran kebijakan ketika keadaan ekonomi memburuk.

Evaluasi Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti sosialisasi, digitalisasi, dan penegakan sanksi, mencerminkan upaya untuk memperbaiki kepatuhan para wajib pajak. Namun, efektivitas kebijakan itu masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pelaksanaannya. Secara kritis, pendekatan kebijakan yang berlaku masih berfokus pada aspek administratif dan belum sepenuhnya mencakup dimensi perilaku masyarakat. Sosialisasi pajak biasanya berlangsung secara formal dan minim interaksi, sehingga tidak dapat meningkatkan pemahaman secara mendalam.

Sebaliknya, sanksi lebih fokus pada menciptakan efek jera, tetapi tidak menumbuhkan kesadaran yang berkelanjutan. Di samping itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak pun menjadi faktor yang menghalangi peningkatan kepercayaan publik. Kepercayaan adalah unsur krusial dalam membangun kepatuhan yang bersifat sukarela. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan perpajakan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan, keterbukaan, serta pendekatan berbasis perilaku.

Sintesis Analisis Berdasarkan

Semua hasil pembahasan, disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan produk dari interaksi yang rumit antara faktor internal dan eksternal. Kesadaran publik menjadi variabel utama yang secara langsung memengaruhi ketaatan wajib pajak. Pemahaman dan sudut pandang berfungsi sebagai elemen yang membentuk kesadaran, sedangkan aspek ekonomi dan kebijakan pemerintah berfungsi sebagai elemen kontekstual yang dapat memperkuat atau mengurangi pengaruh tersebut.

Interaksi antara variabel ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pajak tidak bisa dicapai dengan satu pendekatan saja. Secara konseptual, keterkaitan antara variabel ini menciptakan sistem yang terintegrasi, di mana efektivitas kebijakan perpajakan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara aspek struktural (kebijakan dan ekonomi) serta aspek kultural (kesadaran dan kepercayaan masyarakat).

Oleh karena itu, strategi peningkatan penerimaan pajak harus mengimplementasikan pendekatan menyeluruh yang menjadikan kesadaran publik sebagai fokus kebijakan, didukung oleh sistem perpajakan yang jelas, kebijakan yang fleksibel, serta kondisi ekonomi yang terjaga. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem perpajakan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak adalah fondasi utama dalam pembangunan nasional yang berperan sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Penerimaan pajak yang optimal sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat adalah elemen penting dan penentu utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Kesadaran yang tinggi akan mendorong terciptanya kepatuhan sukarela, sehingga wajib pajak melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan dari luar. Di samping itu, pengetahuan perpajakan dan pandangan terhadap sistem pajak berfungsi sebagai pendorong kesadaran, sementara faktor ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi berperan sebagai unsur penunjang yang memengaruhi kapasitas wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak.

Oleh karena itu, peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga oleh usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat harus dijadikan prioritas utama dalam kebijakan perpajakan oleh pemerintah melalui strategi edukasi yang terencana, sosialisasi yang efisien, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan diharapkan bisa menghasilkan sistem perpajakan yang lebih efisien, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, khususnya kepada dosen pembimbing dan sumber-sumber ilmiah yang menjadi sumber utama.

DAFTAR REFERENSI

- Berutu, M. I. A., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 4751–4758.
- Gunarso, P., Dewi, A. R., & Maheswari, V. N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *GeoEkonomi*, 15(2), 521–531.
- Kurniawan, D., & Sari, M. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 150–162.
- Mardiasmo. 2024. *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Mega Aulia, & Furqon, I. K. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Pembayaran Pajak. *Taxaka Journal*.
- Nasution, F. S., dkk. (2023). Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Akuntansi*.
- Ningsih, A. A., & Umaimah. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 237–253.
- Pratama, A., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 12–25.
- Putra, R. A., & Lestari, N. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 89–98.
- Rahmawati, I., & Hidayat, T. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 101–110.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi terbaru)*. Salemba Empat.
- Sari, D. P., & Susanti, A. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Susanti, N. A., & Putri, S. A. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda serta kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak. *Management and Accounting Research Journal*, 4(2), 123–136.
- Utami, N. P., & Dewi, R. S. (2022). Pengaruh transparansi pajak terhadap kepercayaan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 45–56.
- Widyastuti, R., & Andriani, D. (2021). Pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 345–352